



## **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam**

**Haris Munawar**

Program Studi Magister Pendidikan Islam, Universitas Garut

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah angket, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Lokasi penelitian ialah di Kecamatan Kadungora, Leuwigoong, Cibiuk dan Cilawu dengan jumlah responden 65 orang. Hasil kajian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pengembangan Agama Islam berpengaruh secara positif terhadap Koordinasi Penyuluh Agama Islam dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam upaya Meningkatkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam. Dengan kata lain untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan agama Islam maka pelaksanaan kebijakan agama Islam dan koordinasi penyuluh dengan pengawas harus ditingkatkan pula..

Kata kunci: efektivitas program; koordinasi; pelaksanaan kebijakan

### **1 Pendahuluan**

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk Pendidikan Agama Islam. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai budaya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh agama sebagai wakil pemerintah dalam membina umat menuju kebahagiaan yang hakiki.

Dalam pelaksanaan tugasnya penyuluh agama Islam tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal berkoordinasi dengan pengawas pendidikan

agama Islam demi terwujudnya generasi muda yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah sesuai tujuan bersama. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam masih perlu ditingkatkan. Dan ini menjadi tanggungjawab serta kewajiban bersama bagi setiap muslim, ulama dan tokoh agama, serta pemerintah.

Seperti halnya di Kecamatan Kadungora, Leuwigoong, Cibiuk dan Cilawu, belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan pengembangan agama Islam menjadi salah satu penyebab kurangnya koordinasi antara penyuluh agama Islam dengan pengawas pendidikan agama Islam dan berimbas pada belum efektifnya program pendidikan agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam artikel ini akan membahas tentang “Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam”.

## 2 Metodologi

Dalam penelitian ini, untuk mengungkapkan permasalahan serta mengkaji dan menganalisis hubungan kausal efektif antar variabel yang menjadi fokus penelitian, maka metode yang akan digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan teknik survey.

Populasi dalam penelitian ini adalah para penyuluh agama dan pengawas pendidikan agama Islam di Kecamatan Kadungora, Leuwigoong, Cibiuk dan Cilawu sebanyak 65 orang. Semua populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan melalui angket, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*).

Untuk melihat kondisi objektif ada objek penelitian. Peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

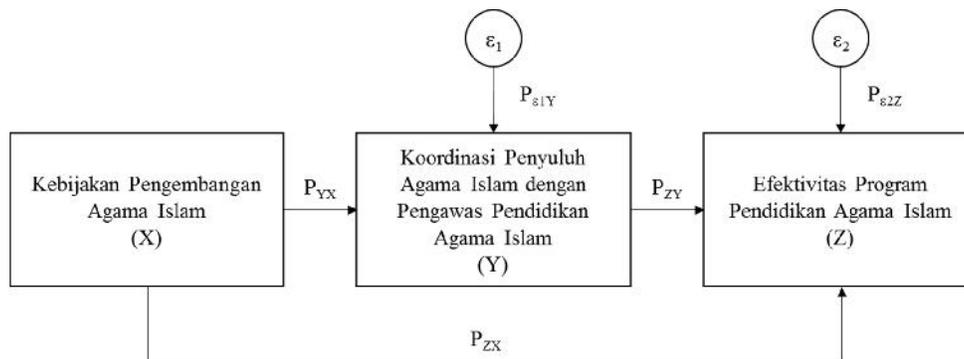
No	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam (X). (Iskandar, 2015)	1. Komunikasi	a. Materi b. Metode penyampaian c. Sumber komunikasi
		2. Struktur Birokrasi	a. Fungsi organisasi b. Komposisi c. Hirarki d. Peraturan-peraturan
		3. Sumber Daya	a. Manusia b. Fasilitas c. Keuangan
		4. Sikap Aparatur	a. Kognitif b. Afektif c. Psikomotorik

No	Variabel	Dimensi	Indikator
2	Koordinasi Penyuluh Agama Islam dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam (Y) (Hasibuan, 2012)	1. Sense of cooperation	a. Kesamaan bidang b. Rasa sepenanggungan
		2. Kompetisi	a. Internal b. Eksternal
		3. Semangat	a. Motivasi b. Kinerja
		4. Esprit de corps	a. Saling menghargai b. Saling mendukung c. Saling memahami
3	Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam (Z) (Richard, 2010)	1. Optimasi Tujuan	a. Kejelasan tujuan b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
		2. Perspektif Sistem	a. Interaksi organisasi b. Hubungan antar komponen
		3. Tekanan Terhadap Perilaku	a. Kepatuhan terhadap norma b. Kontrol

### 3 Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan pengembangan agama Islam terhadap koordinasi penyuluh agama Islam dengan pengawas pendidikan agama Islam untuk mewujudkan efektivitas program pendidikan agama Islam. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Paradigma penelitian

Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil perhitungan analisa statistika

Hipotesis Utama	Koefisien jalur	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	determinan	Makna hubungan
Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam	0,6688	10,0693	1,52109	0,3322	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien jalur	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	determinan	Makna hubungan
Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh Agama Islam	0,3260	5,5206	1,9996	0,6740	Signifikan
Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam	0,0121	0,2709	1,9996	0,0346	Tidak Signifikan
Koordinasi Penyuluh Agama Islam terhadap Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam	0,3191	4,3378	1,9996	0,6809	Signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan statistika dengan analisis jalur, maka ditemukan fakta bahwa secara simultan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Koordinasi Penyuluh Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam

### 3.2 Pembahasan

Model analisis pembahasan yang digunakan pada artikel ini mengacu pada konsep yang diusulkan oleh Ramdhani & Ramdhani (2014) dan Ramdhani, et. al. (2014), sehingga fakta-fakta empiris hasil penelitian dapat diklarifikasi dengan konsep dan/ atau teori yang berkenaan dengan tema penelitian.

Istilah “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintahan. Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif.

Menurut KBBI kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). Sedangkan menurut Edi Sudarto (2013) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain itu menurut Budiardjo (1988) kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan juga merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi

pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

Berkaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan, Edward III (dalam Iskandar, 2015) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau berhasil tidaknya suatu kebijakan yaitu: 1) Komunikasi; 2) Struktur Birokrasi, 3) Sumber daya; dan 4) Sikap aparatur. Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Oleh karenanya kebijakan pengembangan agama itu sendiri mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Departemen Agama yang nantinya diselaraskan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. Menurut Hasibuan (2012), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Handoko (2013), kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Komunikasi dalam pandangan Ramdhani dan Suryadi (2005) dapat diterjemahkan sebagai pola interaksi antar manusia untuk menemukan titik pemahaman yang bermuara pada pendekatan *win-win solution* atas suatu permasalahan tertentu. Hal ini juga ditegaskan oleh Handayani (2010) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayani juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2012).

Menurut Hasibuan (2012) terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu: *sense of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama), *rivalry* (persaingan), *team spirit* (saling menghargai), *esprit de corps* (bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai). Dimana keempat syarat inilah yang akan dijadikan dimensi dari organisasi.

Hasibuan (2012) juga berpendapat bahwa fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi antara lain:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, perkecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan organisasi
- d. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu harus membantu tercapainya tujuan organisasi
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan

Penyuluhan agama merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Bagi proses penyuluhan agama tujuan merupakan salah satu faktor yang penting dan sentral, yang memberi arah atau pedoman bagi langkah aktivitas penyuluhan.

Sedangkan pengawas pendidikan agama Islam adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Efektivitas program pendidikan agama Islam ialah pencapaian hasil program pendidikan agama Islam berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagaimana aktivitas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian, tentunya pendidikan Islam memerlukan landasan kerja yang memberi arah bagi programnya. Sebab dengan adanya dasar dan juga fungsi sebagai sumber semua peraturan yang akan diciptakan sebagai pegangan langkah pelaksanaan dan sebagai jalur langkah yang menentukan arah usaha tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian di lapangan bahwasanya dalam pelaksanaan program pendidikan agama Islam tidak akan efektif tanpa adanya koordinasi yang baik antara penyuluh dengan pengawas pendidikan agama Islam, selain itu koordinasipun tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pelaksanaan kebijakan pengembangan agama Islam yang efektif. Oleh karenanya demi terwujudnya program pendidikan agama Islam yang efektif maka diperlukan adanya pengaruh dari koordinasi dan pelaksanaan kebijakan yang efektif pula.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014), pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Sedangkan menurut Amin Tunggal Widjaya (1993) efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Selanjutnya Permata Wesha (1992) mengatakan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa efektivitas program pendidikan agama Islam ialah pencapaian hasil program pendidikan agama Islam berdasarkan tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya. Dimana menurut Richard (2010) dimensi efektivitas program pendidikan agama Islam meliputi: 1) Optimasi Tujuan, 2) Perspektif Sistem, dan 3) Tekanan Terhadap Perilaku.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi Koordinasi Penyuluh Agama Islam dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap efektivitas program pendidikan agama Islam yaitu diduga kurangnya pemahaman mengenai tugas yang sebenarnya dan belum adanya suatu bidang yang bertugas memantau dan mengarahkan kinerja penyuluh agama dengan pengawas pendidikan agama Islam secara bersamaan.

#### 4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa statistika, secara simultan, pelaksanaan kebijakan pengembangan agama Islam terhadap koordinasi penyuluh agama Islam dengan pengawas pendidikan agama Islam untuk mewujudkan efektivitas program pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dalam peningkatan pelaksanaan kebijakan pengembangan agama Islam dirasa perlu diadakannya timbal balik semacam *reward* dan *punishment* agar lebih giat dalam bekerja, sedangkan dalam peningkatan koordinasi penyuluh dan pengawas perlu adanya sosialisasi ulang mengenai hakikat koordinasi yang sebenarnya, dan untuk peningkatan efektivitas program dakwah perlu diadakan semacam evaluasi bersama agar program-program yang dibuat tidak monoton dan tujuan yang diinginkan tercapai.

#### Daftar Pustaka

- Al-Qurthuby, Syamsu Al-Din. *Jami' al-Bayan li al-Ahkam al-Quran*. Mauqi al-Tafasir (Maktabah Syamilah).
- Al-Thabrani. *Mu'jam al-Ausath*. Mauqi' al-Islam, Maktabah al-Syamilah.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dharma, S. (2013). *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoko, H. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hatta, A. (2012). *The Great Quran Jilid 1 Juz 1-15*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Hatta, A. (2012). *The Great Quran Jilid 2 Juz 16-30*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Iskandar, J. (2015). *Metode Penelitian*. Bandung: Puspaga.
- Makbuloh, Deden. (2016). *Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Malayu S. P, H. (2012). *Manajemen Dasar : Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E., (2014). *Menjadi Kepala Sekolah Professional*. Bandung: Remaja Rosdakarya..
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir*.
- Mustaqim. (2012). *Supervisi Pendidikan Agama Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group.

- Ramdhani, M. A. & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. *International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications 2005*, 6 – 8 December, Penang, Malaysia.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- Robbins, S. P. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, S. P. (2011). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Indeks. Kelompok Gramedia.
- Sudarto, E. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, M. (2010). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Wijaya, A. T. (1993). *Manajemen suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.